

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan bagian penting dari penerapan konsep demokrasi dalam sebuah Negara demokrasi, Negara demokrasi adalah Negara yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta dalam aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pimpinan Negara, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.¹ Partisipasi politik masyarakat juga suatu tindakan yang dilakukan demi mencapai kepentingan umum, berdasarkan nilai-nilai yang legal.²

¹ Ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintahan atau parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial, dan lain sebagainya. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau ikut serta aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Miriam Budiarjo, 2008:367). Menurut Maran (2001:147) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan usaha teroganisir oleh warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu Negara. [Http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/6/2/2016/123-136](http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/6/2/2016/123-136), diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

² Kegiatan yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktifitas politik ini hanya mencakup antara lain menjadi pemimpin partai politik atau kelompok kepentingan (Syahbani, 2004,69), <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/6/2/2016/123-136>, diakses pada Tanggal 3 Mei 2018.

Dalam penelitian Syafrani tentang Faktor - faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2005 dan Zenly Iswandy tentang Status Sosial Ekonomi dan Pengaruhnya dengan Partisipasi Politik, yang dilakukan di Nagari Canduang Kecamatan Kamang Kabupaten Agam.³ Dapat kita lihat bahwa partisipasi menjadi faktor penting dalam proses demokrasi.

Tentunya proses partisipasi politik ini sendiri bisa di lihat dari keberlangsungan Pemilu dan Pilkada yang diikuti masyarakat. Jika di lihat dari situasi masyarakat Indonesia saat ini kesadaran akan berpartisipasi dalam Pemilu sangatlah rendah, masyarakat tidak mau tahu dan tidak peduli akan pentingnya Pemilu, karena kebanyakan masyarakat berfikir bahwa Pemilu itu tidak akan merubah nasib atau keadaan mereka. Kemudian, banyak teori dan pendapat dari para ahli politik dan sosial yang mengatakan status sosial ekonomi, ras, usia, seks dan agama juga mempengaruhi partisipasi politik.⁴

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada

³ Lebih lanjut lihat Syafraini, faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Andalas pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2005, skripsi Universitas Andalas, Padang, 2006. Dan lihat skripsi Zenly Iswandi, status sosial ekonomi dan partisipasi politik (studi pada Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam), fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Andalas, Padang, 2003.

⁴ Menurut Rush dan Althof (1983) hierarki yang seperti itu, bukanlah merupakan prasyarat bagi jenis partisipasi suatu tingkatan berikutnya, walaupun berlaku bagi partisipasi tertentu. Kemudian dari skema itu tampak bahwa hierarki partisipasi politik semakin keatas semakin sedikit jumlahnya untuk diikuti individu.

seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan.⁵ Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan.⁶

Partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan Pemilu. Pemilu yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang tidak diragukan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi kecil (rendah), seringkali dikaitkan dengan pertanyaan dasar, apakah hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat atau rendah. Masih sangat jarang yang mencoba menghubungkan atau mengkaitkan tingkat partisipasi Pemilih dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Karena secara teoretik maupun praksis, hubungan antara besar dan kecilnya tingkat partisipasi dapat saja berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan proses Pemilu dan hasil Pemilu. Hal itu biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih, bahwa tingkat partisipasi pemilih

⁵ Selain Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga menjadi elemen penting dalam menjalankan demokrasi sebuah Negara. Walaupun di sebuah negara sudah menganut demokrasi dan sudah melaksanakan Pemilu secara langsung, akan tetapi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu itu masih kecil maka dianggap demokrasi di Negara tersebut belum berjalan dengan baik atau bisa dikatakan belum sukses. Dalam penyelenggaraan Pemilu di banyak Negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian suara. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga Negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah. [Http//partisipasi-memilih-pada-pemilu-2014-study-penjajakan.pdf](http://partisipasi-memilih-pada-pemilu-2014-study-penjajakan.pdf) diakses pada tanggal 2 Desember 2017

⁶ Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilihan umum dan mengatur kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, sebagian Negara-Negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih. [Http//partisipasi-memilih-pada-pemilu-2014-study-penjajakan.pdf](http://partisipasi-memilih-pada-pemilu-2014-study-penjajakan.pdf) diakses pada tanggal 2 Desember 2017

yang besar atau rendah tergantung dari siapa yang memilih, apakah pemilih yang sudah rasional memberikan pilihan-pilihan atas dasar pertimbangan tertentu, ataukah pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya yang lebih besar.⁷

Menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kategori: (1) Pemain (*Gladiators*) yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik. (2) Penonton (*Spectators*) yaitu ikut serta dalam pemilihan hak suara. (3) Apatitis (*Apathetics*) yaitu orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak memakai hak pilihnya.⁸

1.2 Perumusan Masalah

Pemilihan kepala daerah ini adalah salah satu ciri dari negara yang demokrasi.⁹ Sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, kehidupan demokrasi juga berlangsung di Sumatera Barat, yaitu: Pemilu pertama kali diadakan di Sumatera Barat Tahun 2004 pada pemilihan Legislatif, kemudian pada tahun 2005 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada Tahun 2010 dan terakhir pada Tahun 2015. Sedangkan Pesisir Selatan melakukan pemilihan kepala daerah pertama kali pada Tahun 2005, kemudian di Tahun 2010

⁷<http://partisipasi-memilih-pada-pemilu-2014-study-penjajakan.pdf> diakses pada tanggal 2 Desember 2017

⁸ Budiarto, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 372.

⁹ Pemilihan kepala daerah ini sendiri telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yaitu dirumuskan dalam undang-undang, yang berbunyi: “untuk menjamin pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang Republik Indonesia tentang penetapan Gubernur, Walikota dan Bupati (<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf>) diakses pada tanggal 14 September 2017.

dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2015¹⁰ untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan Tabel 1.1, bisa dilihat jumlah penduduk Pesisir Selatan yang telah mempunyai hak pilih di bawah ini:

Tabel 1.1. Jumlah Warga Pesisir Selatan yang Telah Mempunyai Hak Pilih

NO	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pancung Soal	7.308	7.398	14.706
2	Ranah Pesisir	10.418	11.496	21.914
3	Lengayang	18.721	19.921	38.642
4	Batang Kapas	10.971	11.676	22.647
5	IV Jurai	15.269	16.332	31.601
6	Bayang	13.150	14.444	27.594
7	Koto XI Tarusan	16.371	17.044	33.415
8	Sutera	16.326	16.461	32.787
9	Linggo Sari Baganti	15.502	15.800	31.302
10	Lunang	6.837	6.581	13.416
11	BAB Tapan	4.703	4.812	9.515
12	IV Nag. Bayang Utara	2.589	2.890	5.479
13	Airpura	4.903	4.940	9.843
14	RAH Tapan	4.850	4.897	9.747
15	Silaut	4.709	4.344	9.053

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015¹¹

Pada Pemilihan kepala daerah di Tahun 2015 di Kabupaten Pesisir selatan dilaksanakan dengan 4 pasang calon yaitu, Hendrajoni – Rusma Yul Anwar keluar

¹⁰ Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga Pilkada serentak Nasional pada Tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pilkada secara rutin menjadi agenda Nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 Tahun sekali. Agenda politik nasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal. Konstruksi politik beroperasinya sistem presidensial yang tidak terpecah masing-masing kegiatannya di tingkat lokal sebagai akibat latar belakang politik kepala daerahnya yang beragam dengan pemerintah koalisi di pusat adalah sintesa besar dari pembahasan substansi penting dari demokrasi Pilkada sebagai agenda Nasional. Dahlan Thaib, 1989, (implementasi sistem ketatanegaraan menurut uud 1945), Liberty, Jogjakarta, hlm. 37.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum, (<http://kpu.go.id>.) Diakses pada 2 Mei 2018

sebagai pemenang dengan perolehan 46,71% suara. Mengungguli pasangan Edityawarman – Bakri Bakar 30,36%, Alirmansori – Raswin 16,31%, dan Burhanuddin – Novrial Anas 6,61%.¹² Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat Pesisir Selatan bisa dikatakan rendah, dan jauh dari target awal seperti yang sudah disampaikan oleh ketua KPU Pesisir Selatan Riswandy di Painan, bahwa mereka optimis target 77% angka partisipasi di Pesisir Selatan bisa tercapai.¹³ Berdasarkan pendapat dari ketua KPU tersebut, peneliti kemudian memaparkan tingkat partisipasi Pesisir Selatan seperti pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2. Partisipasi Pemilih Masyarakat Pesisir Selatan Pilkada 2010 dan 2015

Pilkada	DPT	Pemilih	Persentase
2010	277.281 Orang	198.441 Orang	71,56%
2015	312.148 Orang	203.732 Orang	64,56%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015.¹⁴

Dari data Tabel 1.2 di atas tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah di Pesisir Selatan pada tahun 2015 bisa dikatakan rendah yaitu 64,56% dan 35,06 masyarakat Pesisir Selatan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2015. Dibandingkan dengan pilkada 2010 yang partisipasi masyarakat 71,56, maka terjadi penurunan dari partisipasi pemilih masyarakat Pesisir Selatan pada Pilkada 2015. Dari hasil ini tentu belum semua masyarakat yang mengetahui rendahnya partisipasi di Pesisir Selatan. Tentu ini menjadi tanda tanya apa saja yang menyebabkan turunnya partisipasi pemilih di Pesisir Selatan pada Pilkada 2015.

¹² Rekap situng-bupati-wako-2015.pdf diakses pada 5 Mei 2018

¹³ Berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/kpu-pessel-targetkan-partisipasi-pemilih-77-persen diakses 31 Mei 2018

¹⁴ Komisi pemilihan umum, (<http://kpu.go.id>.) Diakses tanggal 2 Mei 2018

Selain itu, pendidikan juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan turunnya partisipasi pemilih. Banyak teori yang mengatakan semakin baik pendidikan maka semakin baik pula partisipasi pemilih masyarakat pada saat Pilkada. Berikut Tabel 1.3 pendidikan Pesisir Selatan Tahun 2010:

Tabel 1.3. Pendidikan Pesisir Selatan 2010

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Belum/Tidak Tamat SD	35.692 Jiwa	20,46%
2	Sekolah Dasar Sederajat	40.056 Jiwa	22,96%
3	SMP Sederajat	33.761 Jiwa	19,35%
4	SMA Sederajat	48.982 Jiwa	28,08 %
5	DI/II/III	2.404 Jiwa	1,38%
6	D4/S1/S2/S3	13.559 Jiwa	1,77%

Sumber: Pesisir Selatan dalam angka Tahun 2010¹⁵

Dari Tabel 1.3 tentang pendidikan di Pesisir Selatan Tahun 2010 didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan belum tamat SD dan SD sederajat mempunyai persentase 20,46% dan 22,96%. Tabel 1.4 di bawah ini dapat di lihat persentase pendidikan masyarakat sipil Tahun 2015:

Tabel 1.4. Pendidikan Pesisir Selatan 2015

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Belum/Tidak Tamat SD	29.411 Jiwa	16,66%
2	Sekolah Dasar Sederajat	38.262 Jiwa	21,67%
3	SMP Sederajat	35.699 Jiwa	20,22%
4	SMA Sederajat	51.728 Jiwa	29,30%
5	DI/II/III	2.880 Jiwa	1,63%
6	D4/S1/S2/S3	18.550 Jiwa	10,51%

Sumber: Pesisir Selatan dalam angka Tahun 2015¹⁶

Dari Tabel 1.4 tentang data pendidikan yang ada di Pesisir Selatan 2015 cukup baik dibandingkan Tahun 2010. Rata-rata masyarakat Pesisir Selatan

¹⁵ Badan pusat statistik (http://pesisir selatan.bps.go.id/website/pdf_publicasi/ oktober 2011) diakses pada 27 Juli 2018

¹⁶ Badan pusat statistik (http://pesisir selatan.bps.go.id/website/pdf_publicasi/ september 2015) diakses pada 14 Desember 2017

mengeyam pendidikan sampai tingkat SMA dan SMP dengan persentase 20,22% dan 29,30%. Selain pendidikan di Pesisir Selatan yang bisa mempengaruhi partisipasi pemilih, indikator lain yang bisa mempengaruhi partisipasi di Pesisir Selatan yaitu faktor pekerjaan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi pada partisipasi pemilih masyarakat. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5. Pekerjaan Masyarakat Pesisir Selatan 2010

NO	Jenis Pekerjaan Masyarakat	Jumlah Penduduk	Persentase
1	PNS Gol I/II/III/IV	6.109 Jiwa	3,70%
2	Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	83.327 Jiwa	50,53%
3	Industri Pengolahan	3.922 Jiwa	2,39%
4	Pedagang Besar, Eceran, Rumah Makan Dan Hotel	27.196 Jiwa	16,49%
5	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Dan Perorangan	27.164 Jiwa	16,47%
6	Jenis Pekerjaan Lainnya	17.197 Jiwa	10,43%

Sumber: Pesisir Selatan dalam angka Tahun 2010¹⁷

Berdasarkan Tabel 1.5 pekerjaan masyarakat Pesisir Selatan 2010 didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan dan wiraswasta, dengan rincian 50,53% atau hampir separuh masyarakat Pesisir Selatan bekerja sebagai pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Adapun pekerjaan masyarakat Pesisir Selatan Tahun 2015 berikut ini:

¹⁷ Badan pusat statistik (http://pesisir_selatan.bps.go.id/website/pdf_publicasi/ Oktober 2011) diakses pada 27 Juli 2018

Tabel 1.6. Pekerjaan Masyarakat Pesisir Selatan 2015

NO	Jenis Pekerjaan Masyarakat	Jumlah Penduduk	Persentase
1	PNS Gol I/II/III/IV	8.832 Jiwa	5,36%
2	Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	75.603 Jiwa	45,89%
3	Industri Pengolahan	8.342 Jiwa	5,06%
4	Pedagang Besar, Eceran, Rumah Makan Dan Hotel	24.079 Jiwa	14,62%
5	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Dan Perorangan	28.750 Jiwa	17,45%
6	Jenis Pekerjaan Lainnya	19.120 Jiwa	11,61%

Sumber: Pesisir Selatan dalam angka Tahun 2015¹⁸

Dari Tabel 1.6 tentang data pekerjaan masyarakat Pesisir Selatan Tahun 2015 masih didominasi oleh petani, nelayan dan wiraswasta. Tapi pekerjaan masyarakat Pesisir Selatan Tahun 2015 mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Pekerjaan masyarakat ini, tentu akan berdampak besar terhadap partisipasi pemilih masyarakat Pesisir Selatan. Masyarakat belum tentu memilih datang untuk berpartisipasi dalam Pilkada dengan keadaan tuntutan ekonomi dan pekerjaan yang menjadi prioritas yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat pada umumnya.

Jika di lihat pada latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Pada latar belakang bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan antara Tahun 2010 dengan 2015 sebesar 7%. Menurut Milbrath dan Goel, dengan pendidikan yang cukup tinggi, pekerjaan yang lebih baik, serta penghasilan tinggi akan cenderung memberikan keleluasaan bagi orang

¹⁸ Badan pusat statistik (http://pesisir-selatan.bps.go.id/website/pdf_publicasi/ tanggal 14 September 2015) diakses pada 14 Desember 2017

tersebut untuk aktif diberbagai aspek kehidupan sosial termasuk dibidang politik.¹⁹

Namun jika di lihat dari Pilkada Tahun 2015, pendidikan di Pesisir Selatan mengalami peningkatan dari Tahun 2010. Pendidikan masyarakat pada Tahun 2010 yang didominasi oleh belum tamat SD dan SD sederajat, kemudian mulai meningkat di Tahun 2015 baik itu SMP, DI/II/III, D4/S1/S2/S3 serta didominasi oleh masyarakat yang berpendidikan setingkat SMA sederajat. Begitu juga dengan pekerjaan masyarakat di Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2010. Peningkatan pekerjaan masyarakat tidak sejelas dan sebesar pendidikan yang masih didominasi petani, nelayan dan wiraswasta, akan tetapi berangsur membaik dibandingkan Tahun 2010. Jika dilihat dari temuan di lapangan, masyarakat yang bekerja sebagai petani akan lebih mementingkan untuk mencari uang ke sawah dan ladang dari pada ikut dalam Pilkada di Pesisir Selatan. Begitu pula dengan masyarakat yg bekerja sebagai nelayan yang pulang sekali 2 minggu atau sekali sebulan dari laut, akan melewatkan hari pemilihan dalam pilkada yang dilaksanakan. Dengan ini pasti akan menurunkan partisipasi pemilih yang ada pada Pilkada.

Berbanding terbalik dengan hal yang dikemukakan oleh Milbarth di atas, hal berbeda peneliti temukan di Pesisir Selatan bahwa pendidikan dan pekerjaan masyarakat Pesisir Selatan di Tahun 2015 terjadi peningkatan dibandingkan

¹⁹ Lihat Milbrath, Political Participation, hlm 221-225. Ini telah menjadi pandangan baku di kalangan ilmuwan politik barat karena di anut oleh semua penulis barat. Sebagaimana yang dikutip Maswa Dirauf, ciri-ciri teori pembangunan politik: kasus partisipasi politik, dalam jurnal ilmu politik 9, oleh asosiasi ilmu politik Indonesia (aipi), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 9-10.

dengan Pesisir Selatan Tahun 2010, justru di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Tahun 2015 terjadi penurunan partisipasi pemilih masyarakat.

Selain mengatakan status sosial ekonomi seseorang mempengaruhi partisipasi pemilih pada saat pemilihan, Milbrath dan Goel juga menambahkan bahwa partisipasi politik cenderung pasif jika kesadaran politik rendah, tetapi kepercayaan politik tinggi. Pola ini terjadi dalam stabilitas politik yang tinggi. Sebaliknya juga dapat terjadi kesadaran politik seseorang tersebut bisa tinggi akan tetapi tidak terdapat stabilitas politik, ini dapat dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Negara.²⁰ Selain dijelaskan oleh Milbrath dan Goel tersebut, Ramlan Subakti juga menjelaskan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi memilih seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan politik kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat, politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sedangkan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah yang dapat dipercaya atau tidak.²¹ Dari apa yang dikatakan oleh Milbrath Goel dan Ramlan Subakti bisa di lihat bahwa kepercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah bisa sangat berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi pemilih masyarakat Pesisir Selatan Pilkada tahun 2015.

²⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 372

²¹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010. hlm.184

Berdasarkan fakta dan data yang ada di atas Peneliti mendapatkan rumusan masalah penelitian “ Apa yang menyebabkan Partisipasi Pemilih Menurun Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengidentifikasi faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih masyarakat Pesisir Selatan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari empat aspek, yaitu aspek akademis, aspek praktis, aspek sosial, dan aspek teknis:

1. Secara akademis dapat memberikan kontribusi kepada pembaca untuk mengetahui faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih masyarakat Pesisir Selatan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015:
2. Secara praktis penelitian jadi acuan pembaca untuk memperluas wawasan tentang partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Secara sosial sebagai pengetahuan yang berguna bagi pembaca sebagai pengetahuan yang baru tentang partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Secara teknis menjadi umpan balik pada pemerintahan, berkaitan dengan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan motivasi dan peran serta masyarakat dalam usaha pengembangan dan peningkatan partisipasi pemilih masyarakat.

